

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Keberadaan sektor perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian, karena melalui kegiatannya, bank membantu dalam aliran dana dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Industri bank memiliki peran yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998, lembaga keuangan bank terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan metode konvensional atau prinsip syariah, yang menyediakan layanan dalam transaksi pembayaran. Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau prinsip syariah, namun tidak menyediakan layanan dalam transaksi pembayaran. (Capriani & Dana, 2016).

Bank Perkreditan Rakyat Syariah, atau sering disebut sebagai BPRS, adalah jenis lembaga keuangan yang fokus pada pelayanan kepada pengusaha dari kalangan mikro, kecil, dan menengah, terutama yang beroperasi di wilayah pedesaan. Melihat betapa pentingnya BPRS dalam mendukung perekonomian masyarakat maka keberadaan BPRS perlu

mendapat perhatian yang lebih baik. Dalam aktivitas operasionalnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memfokuskan perhatiannya pada lima aspek kunci. Pertama, mereka mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai bentuk simpanan dan investasi. Kedua, mereka menyalurkan dana kepada masyarakat dalam beragam bentuk pembiayaan, seperti pembiayaan bagi hasil, pembiayaan murabahah, salam, istishna', pembiayaan berdasarkan qardh, dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak. Ketiga, mereka menempatkan dana yang terhimpun pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan atau investasi. Keempat, mereka melakukan transaksi pengiriman uang, baik untuk kebutuhan internal maupun nasabah. Kelima, mereka menyediakan produk atau menjalankan kegiatan usaha lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah, dengan persetujuan dari Bank Indonesia. (Sukma Jelita & Shofawati, 2019).

Pada masa kini, terdapat banyak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia yang telah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Berikut merupakan data dari jumlah bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan 2023.

Tabel 1. Total jumlah Bank dan Kantor Perbankan Indonesia

<b>Keterangan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>BUS</b>				
Jumlah Bank	14	14	12	12
Jumlah Kantor	1,919	2,034	2,035	1,859
Total Aset	350,364	397,073	441,789	446,850
<b>UUS</b>				
Jumlah Bank	20	20	21	21
Jumlah Kantor	381	392	444	439
Total Aset	174,200	196,875	234,947	227,536
<b>BPRS</b>				
Jumlah Bank	164	163	164	165
Jumlah Kantor	617	627	659	655
Total Aset	13.934.139	14,943,967	17,059,911	17,179,905

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa jumlah bank dan kantor bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan terhadap industri BPRS terhadap peningkatan minat dan permintaan masyarakat terhadap pelayanan BPRS yang dapat mencerminkan meningkatnya minat dan permintaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Dari segi aset, tahun 2020 hingga 2023 aset BPRS lebih besar dibandingkan dengan aset BUS dan UUS, hal ini berdampak pada risiko yang dihadapi BPRS karena risiko

bersifat inheren melekat pada aset atau pendapatan yang dimiliki, semakin tinggi aset yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula resiko yang dihadapi.

BPRS memiliki risiko yang melekat dalam kegiatan memberikan pembiayaan, seperti risiko likuiditas, dan risiko operasional. Oleh karena itu, BPRS perlu melakukan mitigasi risiko untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Manajemen risiko pada BPRS sangat penting untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan memberikan pembiayaan. Regulasi SEOJK nomor 10 tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memberikan panduan bagi BPRS dalam melakukan manajemen risiko. Dalam peraturan tersebut terdapat risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko strategik.

Risiko operasional merupakan salah satu risiko yang perlu diukur karena risiko yang terjadi berhubungan dengan risiko operasional bank dan dapat mempengaruhi pendapatan kotor (*gross income*) pada bank (Ikatan Bankir Indonesia , 2015). Beberapa kasus faktor risiko operasional yang pernah terjadi di Indonesia antara lain:

1. Faktor internal. Dilansir dari kompas.id, salah satu karyawan pada PT Bank rakyat Indonesia tbk atau BRI

melakukan *fraud* terkait dugaan korupsi pengajuan dan penggunaan kartu kredit selama satu tahun yang membuat BRI mengalami kerugian lebih dari 5 miliar. Oleh karena itu, BPRS harus melakukan evaluasi dengan meningkatkan sistem pengendalian internal bank (Kurnia, 2023).

2. Kesalahan SDM, contoh kasus yaitu pembobolan transaksi dari 440 nasabah oleh pegawai Bank NTB Syariah sebesar Rp 11,9 Milyar pada tahun 2020 (BPK RI, 2021)
3. Kegagalan Sistem (IT), contohnya yaitu kasus *ransomware* pada BSI yang terjadi pada pertengahan tahun 2023. Modus dari kejahatan siber ini adalah mengunci akses korban untuk kemudian meminta tebusan (CNBC Indonesia, 2023).
4. Risiko Eksternal (diluar kendali) contohnya yaitu pembobolan, banjir, *outsourcing*, ataupun kasus Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020.

Dampak yang akan dirasakan apabila bank terkena risiko operasional yaitu penurunan harga saham dan berkurangnya dividen bagi *stakeholder*, pengurangan gaji dan bonus bagi para pegawai, dan keamanan serta gangguan pelayanan yang berdampak pada reputasi dan profitabilitas bank sehingga nasabah akan memindahkan dananya ke bank lain apabila ada masalah teknis yang membuat nasabah merasa tidak nyaman. (Ikatan Bankir Indonesia , 2015)

Tabel 2. Indikator Keuangan BPRS di Indonesia Tahun 2020-2022

Rasio	2019	2020	2021	2022
CAR	17,99%	28,60%	23,79%	24,42%
ROA	2,61%	2,01%	1,73%	1,92%
ROE	27,30%	20,29%	16,27%	18,38%
NPF	7,05%	7,24%	6,95%	5,91%
FDR	113,59%	108,78%	103,38%	107,45%
BOPO	84,12%	87,62%	87,63%	86,02%

Salah satu indikator yang menentukan bank termasuk ke dalam kategori sehat atau tidak sehat adalah Rasio BOPO. BOPO menurut kamus keuangan adalah kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur membandingkan satu terhadap lainnya. Berbagai angka pendapatan dan pengeluaran dari laporan rugi laba dan terhadap angka-angka dalam neraca. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013. Nilai rasio BOPO sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia harus memiliki BOPO maksimal 85%. Jika sebuah bank memiliki BOPO lebih dari ketentuan Bank Indonesia maka bank tersebut masuk ke dalam kategori tidak sehat dan tidak efisien.

Dari Tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai rasio BOPO BPRS Indonesia selalu berada diatas rasio ideal, yakni pada tahun 2020 sebesar 87,62%, pada tahun 2021 sebesar 87,63% dan pada tahun 2022 turun menjadi 86,03%.

Tabel 3. Lokasi sebaran BPRS di INDONESIA

No	Nama pulau	Jumlah
1	Sumatra	48
2	Kalimantan	3
3	Jawa	100
4	Bali	1
5	Nusa Tenggara Barat	3
6.	Nusa Tenggara Timur	0
7	Sulawesi	9
8	Maluku	3
9	Papua	0

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

<https://ibpr-s.ojk.go.id/LokasiSebaran>

Dari total 167 BPRS yang ada di Indonesia hampir sebagian besar berada di pulau jawa yaitu Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur sebanyak 95 BPRS seperti yang dapat di lihat pada tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Jumlah BPRS dan Luas Provinsi

Provinsi	Jumlah	Luas Provinsi (km <sup>2</sup> )	Rasio Luas Wilayah (km <sup>2</sup> /BPRS)
Yogyakarta	12	3.186	265,5
Jawa Tengah	27	32.801	1.2616,6
Jawa Barat	27	35.578	1.270,6
Jawa Timur	25	47.083	1.681,5

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa BPRS di lebih terkonsentrasi secara geografis. Konsentrasi ini mengindikasikan potensi pasar yang lebih padat, meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan syariah bagi penduduk setempat, dan dapat mendukung kesuksesan operasional BPRS di wilayah ini. Dengan rasio luas wilayah per BPRS yang lebih rendah, penduduk di wilayah tersebut mungkin memiliki akses yang lebih mudah ke layanan perbankan syariah tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi meskipun memiliki potensi pasar yang lebih padat perlu diingat juga bahwa pasar yang padat akan membawa persaingan bisnis yang lebih ketat dan berdampak pada operasional termasuk dalam pelayanan hal



tersebut dapat di lihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4. Tabel Indikator BOPO di Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur

Provinsi	BOPO			
	2019	2020	2021	2022
Yogyakarta	85,4	94,84	93,17	89,41
Jawa Tengah	81,5	83,53	82,05	81,45
Jawa Barat	81,96	83,92	89,7	86,72
Jawa Timur	85,17	95,48	92,27	88,44

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel 4, Rasio BOPO BPRS di DIY dari data OJK mencapai 85,4% pada tahun 2019 dan 89,41% di tahun 2022, sementara kondisi tertinggi berada pada tahun 2020 yakni sebesar 94,84%. Dibandingkan dengan Provinsi lain, rata-rata BOPO Yogyakarta paling tinggi pada rentang waktu 2019-2022. Seluruh angka tersebut masih diatas batas Seluruh angka tersebut masih diatas batas toleransi yang ditentukan BI yang berarti BPRS di Yogyakarta dalam kondisi buruk, terutama pada tahun 2020 keatas yang mencapai angka 90%. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan BPRS di DIY dalam melakukan kegiatan operasi masih bermasalah, sehingga dapat menyebabkan risiko operasional.

Total Aset sangat mempengaruhi adanya risiko operasional. Besarnya total aset bank mengindikasikan besarnya ukuran bank dan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan

risiko. Ukuran total aset dapat mencerminkan kompleksitas dan keanekaragaman aktivitas bank, yang dapat meningkatkan risiko operasional. Semakin besar total aset, semakin kompleks aktivitas bank, yang dapat meningkatkan risiko operasional. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa total aset berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penghematan risiko operasional bank (Rustam, Bambang, & Rianto, 2013).

Nama BPRS	2018	2019	2020	2021	2022
<b>BANTUL</b>					
Bangun Drajat Warga	131.200.366	146.653.285	150.352.310	171.037.969	184.061.246
Madina Mandiri Sejahtera	73.951.251	85.901.668	78.177.757	103.727.822	145.275.643
Margirizki Bahagia	56.181.806	58.007.818	42.061.864	45.444.611	38.172.404
<b>KOTA YOGYAKARTA</b>					
Barokah Dana Sejahtera	115.206.430	136.115.888	144.469.800	173.897.132	184.358.130
Dana Hidayatullah	24.403.667	26.006.558	24.949.685	29.176.878	42.917.871
Mitra Harmoni Yogyakarta	64.055.926	72.656.091	78.936.641	94.435.047	97.561.609
Unisia Insan Indonesia	50.342.013	69.054.149	75.928.681	83.535.744	104.855.002
<b>SLEMAN</b>					
Cahaya Hidup	27.348.717	33.308.400	32.782.949	39.495.931	50.317.856
Danagung Syariah	44.565.109	49.838.855	38.698.736	42.305.828	40.280.212
Formes	36.126.237	43.715.271	43.947.761	49.453.539	52.677.907
Harta Isan Karimah Mitra Cahaya Indonesia	87.802.565	159.142.538	172.905.494	187.997.411	225.418.561
Mitra Amal Mulia	52.020.929	54.493.905	57.405.823	62.004.716	63.066.980
Sleman (Perseroda)	UNAVAILABLE	UNAVAILABLE	UNAVAILABLE	UNAVAILABLE	UNAVAILABLE

Tabel 5. Kondisi Aset BPRS di Yogyakarta Periode

Desember2022

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Dari tabel di atas dapat di ketahui total aset yang di miliki oleh BPRS yang ada di Yogyakarta. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa BPRS BDW memiliki total aset yang sangat tinggi dari tahun 2019 sampai 2022. BPRS BDW juga merupakan

salah satu BPRS tertua di Yogyakarta yang saat ini berkembang dan eksis di tengah masyarakat khususnya Kabupaten Bantul. BPRS Bangun Drajat Warga atau kerap disingkat dengan BPRS BDW. PT BPRS BDW (Bangun Drajat Warga) ini berlokasi di Jl. Gedongkuning Selatan No. 131, Pelem Mulong, Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. BPRS Bangun Drajat Warga sudah ada sejak tahun 1994. Berdirinya BPRS ini dilatarbelakangi karena pada saat itu lembaga keuangan konvensional masih dianggap belum sesuai dengan syariah Islam sehingga masih diragukan kejelasannya.

BPRS ini merupakan usulan dari majelis ekonomi pimpinan wilayah Muhammadiyah yang memiliki ide untuk mendirikan suatu lembaga keuangan yang berlandaskan syariah. Menengok latar belakang BPRS Bangun Drajat Warga yang berasal dari Muhammadiyah, maka dari itu peneliti berencana untuk meneliti lembaga keuangan syariah yang cakupannya masih dalam satu lingkup dengan universitas, yaitu lingkup Muhammadiyah.

Keberadaan BPRS Bangun Drajat Warga sebagai lembaga keuangan berbasis syariah di daerah Bantul yang memiliki total aset tertinggi juga mencerminkan pentingnya

analisis risiko dalam konteks perbankan syariah regional. Selain itu, melihat *track record* dari BPRS Bangun Drajat Warga sebagai BPRS tertua di Yogyakarta yang sudah hampir 30 tahun melayani dan memberikan kontribusi pada perekonomian pastinya memiliki pengalaman dalam menghadapi risiko seiring perjalanannya melayani masyarakat dengan sistem pembiayaannya yang berlandaskan syariah. BPRS BDW tentunya telah mengembangkan strategi dan kebijakan yang dapat mengurangi dampak negatif dari potensi risiko- risiko yang dapat terjadi, salah satunya risiko operasional.

Dari hasil pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Risiko Operasional terhadap BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan suatu masalah yaitu Bagaimana potensi risiko operasional terhadap BPRS Bangun Drajat Warga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana manajemen risiko operasional terhadap BPRS Bangun Drajat Warga?

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kontribusi teori:
  - a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori dalam manajemen risiko operasional pada BPRS.
  - b. Penelitian ini dapat menyediakan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang manajemen risiko operasional pada BPRS dan lembaga keuangan syariah.
2. Kontribusi praktik:
  - a. Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan praktis bagi manajemen BPRS Bangun Drajat Warga dalam mengidentifikasi, memantau, dan memitigasi risiko operasional yang dihadapi.
  - b. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi lembaga keuangan berbasis syariah lainnya, terutama BPRS lainnya, dalam hal pengelolaan risiko operasional. Temuan penelitian dapat dijadikan referensi dan panduan dalam pengembangan kebijakan dan praktik terkait manajemen risiko operasional pada lembaga keuangan berbasis syariah secara umum.
3. Kontribusi kebijakan:

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan terkait manajemen risiko operasional pada lembaga keuangan berbasis syariah, terutama BPRS. Temuan dan rekomendasi penelitian ini dapat menjadi dasar bagi regulator dan otoritas pengawas dalam memperbaiki dan meningkatkan kerangka kebijakan yang ada untuk mengelola risiko operasional pada sektor keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat berperan dalam memperkuat tata kelola dan stabilitas lembaga keuangan berbasis syariah secara keseluruhan.